



RENJA 2023

RENCANA KERJA PERUBAHAN

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023. Renja ini merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2022 dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Didalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output dan outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami harapkan adanya kritik dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Renja ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Benteng, 2 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah



Drs. MUHTAR, M.M
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19680104 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasa Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. EVALUASI RENJA BPKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)	12
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II	12
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan BPKPD	30
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPD	32
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKPD	36
BAB IV. PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Rencana Tindak Lanjut	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Tujuan dari perlunya suatu perencanaan adalah untuk memberikan pengarahannya yang baik, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan dan menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila perencanaan yang baik dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 yang di susun sebagai salah satu kewajiban bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan amanah Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa salah satu tugas kepala perangkat daerah adalah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu Rencana Kerja (Renja) juga menjadi salah satu alat ukur dalam dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang mengarah pada terwujudnya *good governance*.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 memuat rancangan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Periode 2021-2026. Berdasarkan acuan tersebut, maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wujud dari sebuah perencanaan sehingga menciptakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Landasan Hukum

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan yang akuntabel untuk menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023;
3. Tersedianya rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja yang ingin dicapai terkait urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi pedoman bersama

dalam mencapai rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kepulauan Selayar di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di tahun 2023.

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah di tahun 2023 berupaya merumuskan kebijakan dan program pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sehingga lebih mengarah pada pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain:

1. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;
3. Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan dan Tahunan di tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penyajian dokumen sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan
Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Bab ini menjabarkan tentang Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja serta Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang Simpulan Perubahan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Perubahan Rencana Kerja OPD.

BAB II

**EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
(TAHUN BERJALAN)**

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Renja merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) tahun berjalan. Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

Pada Tahun 2023 sampai dengan triwulan ke II Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan program/kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai dengan gambaran sebagai berikut :

1. Sub kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan;

Dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi target yakni pada :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan :

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD capaian kinerja tahun berjalan telah Tercapai dengan persentase sebesar 13,16%.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD capaian kinerja tahun berjalan telah Tercapai dengan persentase sebesar 13,32%.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja tahun berjalan telah Tercapai dengan persentase sebesar 26,19%.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja tahun berjalan telah Tercapai dengan persentase sebesar 32,16%..

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan :

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD capaian kinerja tahun berjalan telah Tercapai dengan persentase sebesar 16,23%.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan :

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian capaian kinerja tahun berjalan telah Tercapai dengan persentase sebesar 16,81%.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan capaian kinerja tahun berjalan telah melampaui target dengan persentase sebesar 28,00%.

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sub kegiatan :

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah capaian kinerja tahun berjalan telah Tercapai dengan persentase sebesar 8,16%.

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sub kegiatan :

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah capaian kinerja tahun berjalan telah Tercapai dengan persentase sebesar 17,22%.

2. Sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan;

Sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan antara lain pada :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak memenuhi target karena pelaksanaannya pada bulan September atau realisasi kerjanya pada triwulan III.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tidak memenuhi target karena pelaksanaannya pada triwulan III dengan mendasari Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2023.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD tidak memenuhi target karena pelaksanaannya pada triwulan III

dengan mendasari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan :

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD tidak memenuhi target pada triwulan II, disebabkan oleh karena pelaksanaan sub kegiatannya pada triwulan IV.

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan/Pemeriksaan tidak memenuhi target pada triwulan II karena pelaksanaannya masuk pada realisasi triwulan III.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tidak memenuhi target pada triwulan II karena pelaksanaannya masuk pada realisasi triwulan III.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak memenuhi target pada triwulan II karena pelaksanaannya masuk pada realisasi triwulan III.

Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak memenuhi target pada triwulan II karena pelaksanaannya masuk pada realisasi triwulan ke III.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak memenuhi target pada triwulan II karena pelaksanaannya masuk realisasi triwulan ke III.

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan sub kegiatan :

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS tidak memenuhi target pada triwulan II karena pelaksanaannya akhir masuk realisasi triwulan ke III.

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD tidak memenuhi target pada triwulan II karena pelaksanaannya masuk realisasi triwulan ke III.

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD tidak memenuhi target pada triwulan II karena pelaksanaannya masuk realisasi triwulan ke III.

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD tidak memenuhi target pada triwulan II karena pelaksanaannya masuk realisasi triwulan ke III.

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD tidak memenuhi target pada triwulan II karena pelaksanaannya masuk realisasi triwulan ke III.

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tidak memenuhi target pada triwulan ke II karena pelaksanaannya masuk realisasi triwulan ke III.

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan :

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah tidak memenuhi target pada triwulan II karena pelaksanaannya masuk realisasi triwulan ke III.

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan :

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak teralisasi sebesar 750.000.000 atau dengan persentase sebesar 10,88% ke Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk penanganan inflasi dan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah teralisasi sebesar 200.000.000 atau dengan persentase 2,90% pada triwulan ke III.

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota teralisasi tidak memenuhi target pada triwulan I atau pada triwulan II karena realisasi kinerjanya masuk pada triwulan III.

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sub kegiatan :

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah tidak memenuhi target pada triwulan I atau pada triwulan II karena pelaksanaannya pada bulan September atau realisasi kinerjanya masuk pada triwulan III.

Secara persentase realisasi program/kegiatan dan sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada renstra yang direncanakan, dan tidak ada kegiatan tidak mencapai target yang direncanakan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun berjalan sampai dengan triwulan ke II dapat dilihat penyajiannya dalam Tabel 2.1. sebagai berikut:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Rencana OPD pada Tahun 2021 s.d 2026 (akhir periode Rencana OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana OPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Pada Tahunan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi yang Ditevaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Tahun Pelaksanaan Rencana OPD		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana OPD s.d tahun 2023 (%)		Unit OPD yang Mengikuti	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	Memelihara Ketersediaan Masyarakat Terhadap Pelayanan	5.02.01.2.02.01	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD	85 Angka	132.661.674.513	70,00 %	10.392.473.975	72,5 Angka	11.349.153.232																
2		5.02.01.2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan tepat waktu	100,00%	452.000.000	20,00	30.807.500	100,00%	84.529.000	0,00%														
		5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	48.000.000	3	51.000.000	3	18.800.000	0														
		5.02.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10	90.000.000	2	3.000.000	2	10.000.000	0														
		5.02.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	10	48.000.000	2	4.845.500	2	10.000.000	0														
		5.02.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	10	48.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	0														
		5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	80.000.000	2	6.948.000	2	14.000.000	0														
		5.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	48.000.000	1	2.910.000	1	12.529.000	0														
		5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100,00%	90.501.379.213	16,67	4.432.385.545	100,00%	47.468.007.592	0,00%														
		5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	295	90.174.379.213	59	4.389.792.045	59	4.693.130.592	0														
		5.02.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengeluaran/Perikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengeluaran/Perikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60	62.000.000	12	12.500.000	12	12.707.000	0														
		5.02.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5	30.000.000	0		1	7.812.000	0														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s.d 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Biaya OPD Tahun berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya yang Diserahkan	Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya OPD Tahun Pelaksanaan (2023)	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran OPD s.d tahun 2023 (%)	Status Capaian Kinerja Tahun 2023				
						K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV					K	Rp	K	Rp
1		5.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	5	600.000.000	1	75.071.000	1	47.731.000	0	22.200.000	0	14.101.000	0	36.301.000	1	11.372.000	20,00%	18,56%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.06.09	Penyediaan Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ruang/Konfirmasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	5	3.750.000.000	1	433.586.238	1	200.060.000	0	141.000.055	0	47.499.688	0	188.499.744	1	622.085.978	20,00%	16,59%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pemerintahan	100,00%	1.150.000.000	0,00	0	91.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit)	40	1.150.000.000	0	0	91.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan	100,00%	31.233.795.300	19,22	4.831.495.394	100,00%	5.369.920.940	0,00%	1.291.399.025	0,00%	1.364.991.692	0,00%	2.656.590.715	19,22%	7.467.886.105	19,22%	23,98%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	17	20.403.795.300	3	3.405.742.274	3	3.777.220.940	0	928.668.758	0	921.019.565	0	1.849.688.324	3	5.255.430.598	17,65%	25,76%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan (laporan)	10	120.000.000	2	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20,00%	0,00%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	5	10.700.000.000	1	1.425.753.120	1	1.587.700.000	0	362.730.266	0	443.972.125	0	806.702.391	1	2.232.455.511	20,00%	20,86%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	100,00%	2.385.500.000	11,37	454.175.797	100,00%	556.966.000	12,25%	98.542.043	18,14%	121.328.142	0,00%	219.870.185	16,98%	674.045.982	16,98%	28,26%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	441	2.045.500.000	72	424.376.797	80	422.750.000	20	93.707.043	20	111.707.142	0	205.414.185	11,2	639.790.982	25,40%	30,79%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	180	215.000.000	32	29.799.000	34	34.216.000	4	4.835.000	10	9.621.000	0	14.456.000	46	44.255.000	25,56%	20,58%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	5	125.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Pelayanan BLUD	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Belum Tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKPD

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran keseluruhan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Selayar dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan Renstra yaitu : ***Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif*** dengan indikator tujuan adalah Indeks pengelolaan keuangan daerah dan ***Mewujudkan Reformasi Birokrasi BPKPD*** dengan indikator tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi BPKPD.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka telah ditentukan 5 (lima) indikator sasaran Strategis yaitu:

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD;

No	Indikator Kinerja Utama BPPPD	SPM	IKK	Target kinerja Capaian Rensta	Realisasi / Proyeksi kinerja Capaian Renstra Tahun Berjalan	Cacatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai SAKIP OPD	-	B	B	B	
2	Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	-	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP	WTP	-	
4	Persentase Peningkatan Asli Pendapatan Daerah (PAD)	-	5.48%	5.48%	5.48%	

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Berjalan sampai Triwulan II

4. Nilai SAKIP OPD

5. Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Hasil analisis kinerja pelayanan disajikan dalam Tabel 2.2. dengan Pencapaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan sasaran/target kinerja sebagai berikut :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Terdapat beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu pelaksanaan kerja di kabupaten Kepulauan Selayar yang berhubungan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pengelolaan Anggaran Daerah
 - A. Isu Strategis :
 - Pembahasan penyusunan KUA PPAS yang relatif panjang dengan DPRD;
 - Jumlah subkegiatan yang cukup banyak.
 2. Bidang pengelolaan perbendaharaan daerah
 - A. Isu Strategis :
 - Sinkronisasi anggaran dan rencana belanja anggaran program dan kegiatan APBD.
 - SP2D online.
- B. Permasalahan
 - waktu.
 - Penyusunan Raperda APBD Pokok dan Perubahan secara tepat

- B. Permasalahan
 - Terjadinya pengajuan SPM dan SP2D pada akhir tahun anggaran
- 3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - A. Isu Strategis :
 - Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi target RPJMD.
 - Tersusunnya Raperda APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu.
 - B. Permasalahan
 - Rendahnya pemahaman SDM dalam mengelola administrasi pencatatan akuntansi sesuai dengan SAP dan penggunaan aplikasi keuangan berbasis Teknologi Informasi.
- 4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - A. Isu Strategis :
 - Terdatanya Barang Milik Daerah kedalam daftar inventaris barang milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
 - Terlaksananya pengamanan atas barang milik daerah.
 - B. Permasalahan
 - Administrasi dan pencatatan barang milik daerah yang belum optimal.

- Masih banyaknya kesadaran masyarakat terhadap ketepatan dan ketepatan waktu penyelesaian pembayaran pajak.
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketepatan daerah
 - Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah
 - Belum optimalnya penggunaan sumber-sumber pendapatan daerah
- B. Permasalahan
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi target RPJMD;
 - Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib, akurat dan berbasis Teknologi Informasi.
- A. Isu Strategis
5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Masih banyaknya lahan yang digunakan atau dimiliki Pemda yang belum mempunyai Dokumen/Sertifikat.

- Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :
1. 3 (Tiga) Program Teknis yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan teknis yang berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi BPKPD yaitu perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah adalah :
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan;
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan; dan
 - 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKPD

menjadi 3 target dengan persentase sebesar 10,63%.
28.000.000,00 disebabkan bertambahnya target kinerja dari 2 penambahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. pagu pada anggaran pokok Rp. 18.000.000,00 dan mengalami Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah.

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

14 Kegiatan dan 96 Sub Kegiatan sebagai berikut :

Untuk mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pada perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 akan dilaksanakan melalui 4 Program, Untuk mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pada perubahan Kegiatan.

Kabupaten/Kota terdiri dari 7 Kegiatan dan 35 Sub 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah keuangan dan umum, kepegawain dan hukum di lingkup diatas yang banyak terkait dengan kegiatan program, yang menunjang keberhasilan program teknis tersebut 2. 1 (Satu) Program Rutin/Umum yang terdiri dari kegiatan

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu sebesar Rp. 10.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.8.845.000,00 sisa dana Rp.11.845.000,00 dengan persentase 13,16%.
- Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
- Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1.1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - 5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - 6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - 7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - 10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - 11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
 - 1.2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 2. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

3. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
4. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
6. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PRK)
8. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
9. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
10. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 1.3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
8. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
9. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
10. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
11. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
12. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
- 1.4. Kegiatan Penujangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- 1.5. Kegiatan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan Standar Harga

2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah

4. Inventarisasi Barang Milik Daerah

5. Pengamanan Barang Milik Daerah

6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahhtanganan, Pemsnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Daerah

9. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

10. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Kebijakan Pajak Daerah

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Daerah

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang disusun berdasarkan kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. RKA-OPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry ke dalam aplikasi penganggaran (SIPD) sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
11. Penagihan Pajak Daerah
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Rencana Program dan Kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dan diajukan untuk ditempuh dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, adalah program gabungan untuk mendukung program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 768). Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tahun 2023 Nomor 125) dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Anggaran 2023 ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

pendanaannya didasarkan pada Perubahan APBD Kabupaten sebanyak 4 Program, 14 Kegiatan dan 96 Sub Kegiatan yang Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) untuk mendanai Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Tahun 2023 sebesar Rp. 155.762.235.893,- (Seratus Lima Puluh Lima Adapun jumlah anggaran perubahan yang direncanakan pada

dan Pendapatan Daerah. Rencana Kegiatan/Sub Kegiatan yang disusun dan yang diajukan seharusnya dalam pelaksanaannya sudah Responsif Gender.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikator untuk tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Renja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibawah ini :

Tabel 3.3
REKAPITULASI PERUBAHAN RENJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Sumber Dana	Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target 2023		Pagu Indikatif				Target	Pagu Indikatif
				Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				
5											
5	5.02										
5	5.02	02	01								
5	5.02	02	01								
5	5.02	02	01								
5	5.02	02	01								
5	5.02	02	01								
5	5.02	02	01								
5.02	01	2.01	0003								
5.02	01	2.01	0002								
5.02	01	2.01	0003								

					Perubahan RKA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dok	10,000,000	10,000,000	PAD			
5.02	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kepulauan Selayar	2 Dokumen		1 Dok	10,000,000	10,000,000	PAD	2 Dok		8,000,000
5.02	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kepulauan Selayar	2 Dokumen		1 Dok	10,000,000	10,000,000	PAD	2 Dokumen		9,000,000
5.02	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kepulauan Selayar	2 Laporan		2 Lap	14,000,000	14,000,000	PAD	2 Laporan		11,700,000
5.02	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	3 Laporan			12,529,000	12,529,000	PAD	3 Laporan		9,000,000
5.02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kepulauan Selayar				4.693.130.592	4.575.550.000		100%		4.409.969.451
5.02	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kepulauan Selayar	59 Orang /12 Bulan			4,693,130,592	4,575,550,000	PAD	59 Orang /12 Bulan		4,374,969,451

5.02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kepulauan Selayar	12 Dok		12,707,000	26,369,000	PAD	12 Dokumen	10,000,000
5.02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kepulauan Selayar	1 Dok		7,812,000	9,327,000	PAD	1 Dokumen	5,000,000
5.02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepulauan Selayar	2 Lap		12,377,000	12,377,000	PAD	2 Laporan	10,000,000
5.02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kepulauan Selayar	1 Dok		10,068,000	10,068,000	PAD	1 Dokumen	5,000,000
5.02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepulauan Selayar	24 Lap		11,913,000	21,736,000	PAD	24 Laporan	5,000,000
5.02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kepulauan Selayar			75,250,000	75,250,000		100%	205,000,000
5.02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kepulauan Selayar	145 Paket	145 Paket	0	0		145 Paket	105,000,000

5.02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	5.250,000	5.250,000	PAD	1 Dokumen	0
5.02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kepulauan Selayar	4 Orang	4 Orang	0	0	PAD	5 Orang	50.000,000
5.02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepulauan Selayar	10 Orang	10 Orang	70.000,000	70.000,000	PAD	10 Orang	50.000,000
5.02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Personil pemenuhan administrasi umum kantor	Kepulauan Selayar			422.979.700	832.462.700		100%	604.986.500
5.02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kepulauan Selayar	Paket	Paket	0	0		1 Paket	5.000,000
5.02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kepulauan Selayar	10 Paket	10 Paket	20.000,000	125.775,000		12 Paket	95.000,000
5.02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kepulauan Selayar	1 Paket	1 Paket	102.218,700	145.926,700		1 Paket	79.986,500
5.02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Kepulauan Selayar	1 Paket	1 Paket	31.970,000	31.970,000		1 Paket	35.000,000

5.02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kepulauan Selayar	1 Dok	1 Dok	21,000,000	21,000,000			1 Dokumen	15,000,000
5.02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kepulauan Selayar	1 Lap	1 Lap	47,731,000	77,731,000			1 Laporan	100,000,000
5.02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepulauan Selayar	1 Lap	1 Lap	200,060,000	450,060,000			1 Laporan	260,000,000
5.02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kepulauan Selayar	1 Dok	1 Dok	0	0	0		1 Dokumen	15,000,000
5.02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD	Kepulauan Selayar			91,500,000	61,000,000			100%	100,000,000
5.02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kepulauan Selayar	3 Unit	2 Unit	91,500,000	61,000,000			8 Unit	50,000,000
5.02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kepulauan Selayar	6 Unit	6 Unit	0	0	0		6 Unit	20,000,000
5.02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kepulauan Selayar	3 Unit	3 Unit	0	0	0		3 Unit	15,000,000
5.02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kepulauan Selayar	3 Unit	3 Unit	0	0	0		3 Unit	15,000,000

				Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan																
5.02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kepulauan Selayar															
5.02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kepulauan Selayar	3 Lap	3 Lap	3.777.220,940	3.735.683,940								100%	3 Lap	1.806.110,500	
5.02	01	2.08	0003	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kepulauan Selayar	2 Laporan	1 Lap	5.000,000	5.000,000											0
5.02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Lap	1.587.700,000	1.872.660,000										1 Laporan	3.039.808,000
5.02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Kepulauan Selayar	100%	100%	556.966,000	634.226,000										100%	450.000,000
5.02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	Kepulauan Selayar	80 Unit	80 Unit	422.750,000	500,010,000										88 Unit	400.000,000
5.02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kepulauan Selayar	34 Unit	34 Unit	34.216,000	34.216,000										36 Unit	30.000,000

5.02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kepulauan Selayar	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000			1 Unit	20.000.000
5.02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah				143.978.310.322	136.233.758.756			WTP	
5.02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kepulauan Selayar			962.449.000	1.097.449.000			5,00%	460.000.000
5.02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kepulauan Selayar	2 Dok	2 Dok	172.238.000	172.238.000			2 Dok	40.000.000
5.02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kepulauan Selayar	2 Dok	2 Dok	172.238.000	172.238.000			2 Dok	40.000.000
5.02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kepulauan Selayar	45 Dok	45 Dok	15.000.000	15.000.000			45 Dok	15.000.000
5.02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kepulauan Selayar	45 Dok	45 Dok	15.000.000	15.000.000			45 Dok	15.000.000
5.02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kepulauan Selayar	45 Dok	45 Dok	15.000.000	15.000.000			45 Dok	15.000.000
5.02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kepulauan Selayar	45 Dok	45 Dok	15.000.000	15.000.000			45 Dok	15.000.000
5.02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kepulauan Selayar	3 Dok	3 Dok	150.365.000	175.365.000			3 Dok	140.000.000

5.02	02	2.03	0001	Daerah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Lap	10,956,000	10,956,000			1 Laporan	20,000,000
5.02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-L/O dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-L/O, dan Beban	Kepulauan Selayar	12 Dok	12 Dok	19,018,000	19,018,000			12 Dokumen	30,000,000
5.02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Lap	19,786,000	20,286,000			1 Laporan	20,000,000
5.02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tekonsolidasi	Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Lap	20,000,000	20,000,000			1 Laporan	20,000,000
5.02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dok	429,932,402	486,807,402			1 Dokumen	192,000,000

5.02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kepulauan Selayar	1 Lembaga	1 Lmbg	0	50.000.000					0
5.02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Lap	20.002.000	28.252.000		1 Laporan		23.000.000	
5.02	02	2.04		Penunjang Usuan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kepulauan Selayar			141.325.639.170	133.014.588.604				139.681.323.000	
5.02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Lap	129.384.781.000	131.703.871.000		1 Laporan		134.433.323.000	
5.02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Lap	9.692.858.170	1.346.907.604		1 Laporan		3.000.000.000	
5.02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Lap	2.248.000.000	2.268.000.000		1 Laporan		2.248.000.000	
5.02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kepulauan Selayar			600.000.000	750.000.000				0	
5.02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	50 Orang	50 Orang	600.000.000	750.000.000				0	

5.02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kepulauan Selayar	Assets Management		973.252.000	1.349.287.000										
5.02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tdk Tercatat dalam Assets Management	Kepulauan Selayar		973.252.000	1.349.287.000										465.549.703
5.02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	97.900,000	110,686,000					1 Dokumen					60.016.200
5.02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kepulauan Selayar	45 Dok	22.600,000	20,860,000					45 Dokumen					0
5.02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kepulauan Selayar	1 Laporan	22.600,000	96,808,800					1 Laporan					20.000.000
5.02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kepulauan Selayar	1 Laporan	97.952.000	97.952.000					1 Laporan					45.000.000
5.02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	Kepulauan Selayar	1 Laporan	543.700,000	807,371,200					1 Laporan					185.000.103
5.02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepulauan Selayar	1 Laporan	25.600,000	25,600,000					1 Laporan					37.930.000
5.02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Kepulauan Selayar	100 Dokumen	50,000,000	63,260,000					100 Dokumen					47.623.400

					Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
5.02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kepulauan Selayar	4 Laporan	4 Lap	75,300,000	75,300,000		4 Laporan	40,000,000							
5.02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Lap	13,200,000	20,157,000		1 Laporan	0							
5.02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	25 Orang	25 Orang	24,400,000	31,292,000		25 Orang	29,930,000							
5.02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah	Kepulauan Selayar			3,233,861,497	3,688,861,497										
5.02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kepulauan Selayar			3,233,861,497	3,688,861,497			2,106,268,646							
5.02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kepulauan Selayar	12 Dok	12 Dok	1,022,229,197	1,147,229,197		12 Dokumen	629,392,437							
5.02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kepulauan Selayar	2 Dokumen	2 Dok	529,842,000	529,842,000		2 Dokumen	155,000,000							
5.02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyelesaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Kepulauan Selayar			130,000,000	130,000,000										

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini disusun juga untuk mengupayakan ketepatan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing bidang dan subbagian unit kerja lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini merupakan acuan atau pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD (RKAP-SKPD). oleh sebab itu dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana kerja dibutuhkan sinergitas dan koordinasi yang baik secara berkala dengan penuh rasa tanggungjawab oleh seluruh bidang/subbagian lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan di tahun 2023.

4.1. Kesimpulan

PENUTUP

BAB IV

dihasilkan sebelumnya, penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kepulauan Selayar tidak lepas dari hasil capaian kinerja yang telah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Peyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja)

dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. beberapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau yang organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan perencanaan tahunan yang disusun sebelum melaksanakan Kepulauan Selayar ini merupakan bagian dari dokumen Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan

4.1. Rencana Tindak Lanjut

Selain itu juga di maksudkan untuk menjaga efektifitas dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023. dan sub kegiatan yang dilaksanakan juga kesesuaian antara target monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja program, kegiatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sekaligus

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 dengan tetap memperhatikan peluang, potensi dan tantangan yang dihadapi saat ini.

Benteng, September 2023

Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar



Pangkat Utama Muda
NIP : 19680104 199603 1 001